

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Xinjiang adalah konflik yang terjadi di Tiongkok. Konflik ini melibatkan antara etnis Uyghur yang merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Tiongkok dengan pemerintah Tiongkok sendiri. Konflik Xinjiang ini, sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Akar penyebabnya adalah ketegangan etnis antara warga Uighur muslim dan warga Tiongkok yaitu etnis Han. Semenjak etnis Han banyak masuk ke wilayah Xinjiang, etnis Uighur ini merasa tersisih karena etnis Han didukung oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu etnis Han ini juga memiliki kecakapan teknis dari provinsi-provinsi di bagian timur Tiongkok. Para migran yang merupakan etnis Han ini jauh lebih mahir berbahasa mandarin dan lebih diberi pekerjaan oleh pemerintah Tiongkok sehingga lapangan pekerjaan disana di dominasi oleh etnis Han. Hal ini menyebabkan banyak etnis Uighur kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan.¹

Hal ini menimbulkan penentangan mendalam di kalangan warga Uighur, yang memandang perpindahan etnis Han ke Xinjiang ini sebagai alasan dari pemerintah

¹Annual Report, 2007, "Congressional-Executive Commission on China"
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hrg38026/pdf/CHRG-110hrg38026.pdf> diakses 24 Februari 2014

Tiongkok untuk menggerogoti posisi mereka, dan menguasai wilayah Xinjiang yang memiliki posisi strategis dan kaya akan sumber daya minyak dan gas.

Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, terkait dengan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang menciptakan suatu sensitifitas yang tinggi diantara etnis Han dan Uighur. Sehingga etnis Uighur ingin melakukan separatisme karena banyak faktor pemicu yang menyebabkan konflik itu memuncak pada bulan Juli 2009 yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di Urumqi yang merupakan ibukota Xinjiang serta tuntutan pemisahan diri di wilayah Xinjiang. Akibat dari peristiwa ini adalah 184 orang tewas, 1700 orang terluka, dan 1434 muslim Uighur diculik dan dihukum oleh pemerintah Tiongkok.

Konflik Xinjiang ini terjadi bukan hanya karena adanya tekanan dari pemerintah, tetapi karena kebijakan-kebijakan Tiongkok yang memberatkan etnis Uighur. Pada tahun 1990, pemerintah Tiongkok melarang pembangunan masjid dan madrasah. Hal ini berujung pada konflik kekerasan antara umat muslim di Xinjiang dengan pemerintah.² Sehingga pada tahun 1949 masjid di Xinjiang mengalami pemerosotan. Jumlah masjid dibatasi dan institut keagamaan juga dibatasi secara ketat dan juga pemerintah memberlakukan pengetatan dalam beribadah. Misalnya saja, anak usia dibawah 18 tahun tidak boleh melakukan sholat berjamaah di masjid. Umat muslim juga diminta menandatangani semacam surat pertanggung jawaban yang isinya berjanji untuk tidak berpuasa dan shalat tarawih atau kegiatan keagamaan

² Anshari Thayib, *Islam di China*, Surabaya: Amarpress, 1991, Hal.75

lainnya selama bulan Ramadhan.³ Kalau mereka menolak maka akan diancam kehilangan pekerjaannya. Pemerintah juga memasang 17.000 kamera pengintai di Urumqi untuk mengawasi setiap kegiatan muslim Uighur.

Maka dari itu mereka tunduk kepada pemerintah Tiongkok karena muslim Uighur hanyalah warga minoritas di Xinjiang. Selain itu muslim Uighur juga dipersulit untuk melaksanakan ibadah haji karena jumlah pemberangkatan haji dibatasi oleh pemerintah Tiongkok. Dan juga proses pembuatan paspor juga dipersulit, serta pemerintah juga membatasi biro perjalanan haji.⁴

Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur dan banyaknya korban yang jatuh dalam konflik Xinjiang memunculkan reaksi dari publik dan pemerintahan Turki.⁵ Turki bereaksi keras terhadap tragedi tersebut. Misalnya seperti warga Turki melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung etnis Uighur di Istanbul pada tanggal 12 Juli 2009.⁶ Sekitar 10.000 orang ikut berpartisipasi dalam demo tersebut yang diadakan oleh partai Islam Saadet, yang marah atas apa yang mereka anggap sebagai penindasan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Para demonstran ini mengecam kekerasan etnik yang terjadi di Xinjiang dan meminta supaya pemerintah Turki ikut campur melindungi umat Islam Uighur di Xinjiang. Mereka meneriakkan “Tiongkok

³ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/11/08/09/lpmw0y-masya-allah-muslim-uyghur-cina-dilarang-puasa-selama-ramadhan> diakses pada 5 September 2014

⁴ *Ibid*

⁵ <http://www.forcedmigration.org/podcasts-videos-photos/video/uyghur> diakses 15 September 2014

⁶ <http://nurray.wordpress.com/2009/07/07/140-tewas-dalam-kerusuhan-di-kawasan-muslim-uyghur-cina/> diakses pada tanggal 5 September 2014

pembunuh, bebaskan muslim Uighur”. Selain itu para demonstran juga membawa gambar-gambar Rebiya Kadeer, yang merupakan pemimpin komunitas Uighur.⁷

Selain reaksi dari masyarakat sipil, media masa di Turki seperti Bugun juga memberikan perhatian lebih terhadap konflik di Xinjiang tersebut. Mereka memberitakan peristiwa tersebut dengan lengkap dan memberikan artikel khusus tentang hubungan etnisitas Uighur-Turki serta nasionalisme Turki. Dan juga media massa yang paling berpengaruh di Turki, Hurriyet, edisi 8 Juli 2009, mengatakan bahwa petugas keamanan Tiongkok adalah pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kerusuhan tersebut.⁸

Protes juga dilontarkan oleh Menteri Perdagangan dan Industri Turki Nihat Ergun yang menyerukan boikot terhadap produk dari Tiongkok.⁹ Dalam pernyataan pribadinya, Menteri Perdagangan dan Industri Turki mengancam Tiongkok dengan mengatakan, jika Negara yang produk-produknya dikonsumsi oleh rakyat Turki tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan maka Turki akan meninjau kembali konsumsi-konsumsi produk-produk tersebut. “Konsumen yang membeli sebuah produk harus tahu apakah Negara yang memproduksi barang itu menghormati nilai-nilai kemanusiaan atau tidak,” kata Ergun saat ditanya para wartawan tentang kerusuhan di Xinjiang.

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/07/13/61863-ribuan-orang-turki-demo-dukung-minoritas-uighur> diakses 5 September 2014

⁸ <http://www.opendemocracy.net/article/china-turkey-and-xinjiang-a-frayed-relationship> diakses pada tanggal 5 September 2014

⁹ <http://eramuslim.com/berita/dunia/turki-serukan-boikot-produk-china.htm> diakses 5 September 2014

Selain itu Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan juga turut menyatakan dukungan terhadap demo anti China di depan kedutaan Besar Tiongkok di Ankara dengan memprotes tindakan pemerintah Tiongkok sebagai suatu bentuk genosida dan mengkritik sikap pemerintah Tiongkok yang cenderung tidak terlalu bereaksi terhadap konflik tersebut.¹⁰ Perdana Menteri Erdogan meminta kepada pihak berwenang di Tiongkok agar melakukan intervensi untuk mencegah lebih banyak korban lagi. Erdogan mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan langsung pada tanggal 10 Agustus 2009 lalu di stasiun televisi NTV juga mengancam akan membawa isu tersebut kepada Dewan Keamanan PBB yang mana Turki merupakan anggota tetap dewan Keamanan PBB.¹¹ Perdana Menteri Turki Erdogan pun sempat menyampaikan pesan melalui utusan kepada Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao yang berisi tentang kecaman terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok guna menyelesaikan masalah di Xinjiang. Hal ini membuat hubungan kedua Negara sempat memanas untuk sesaat.¹²

Tetapi pada tahun 2010, hubungan kedua Negara tersebut semakin membaik dan malah menjalin kerjasama dibidang ekonomi dan politik. Dari penjelasan diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji tentang latar belakang keterlibatan Turki di dalam konflik Xinjiang di Tiongkok.

¹⁰ <http://www.france24.com/en/20090710-turkish-pm-erdogan-xinjiang-violence-genocide-turkey-uighurs-han-trade-beijing-china/> diakses pada tanggal 25 Februari 2014

¹¹ *Ibid*

¹² <http://www.sinaimesir.com/beijingkecam-pernyatanerdogancetak.php?id=1> diakses pada tanggal 5 September 2014

B. Pokok Permasalahan

Mengapa Turki terlibat dalam konflik Xinjiang?

C. Kerangka Pemikiran / Teori yang Digunakan:

Kerangka berfikir merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.¹³ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili obyek atau fenomena.¹⁴

Berdasarkan dari uraian diatas, kerangka dasar teori yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori pengambilan keputusan luar negeri dan konsep intervensi.

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka teori yang akan digunakan adalah teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri. Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh William. D. Coplin.

Menurut teori pembuatan keputusan William D. Coplin, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat

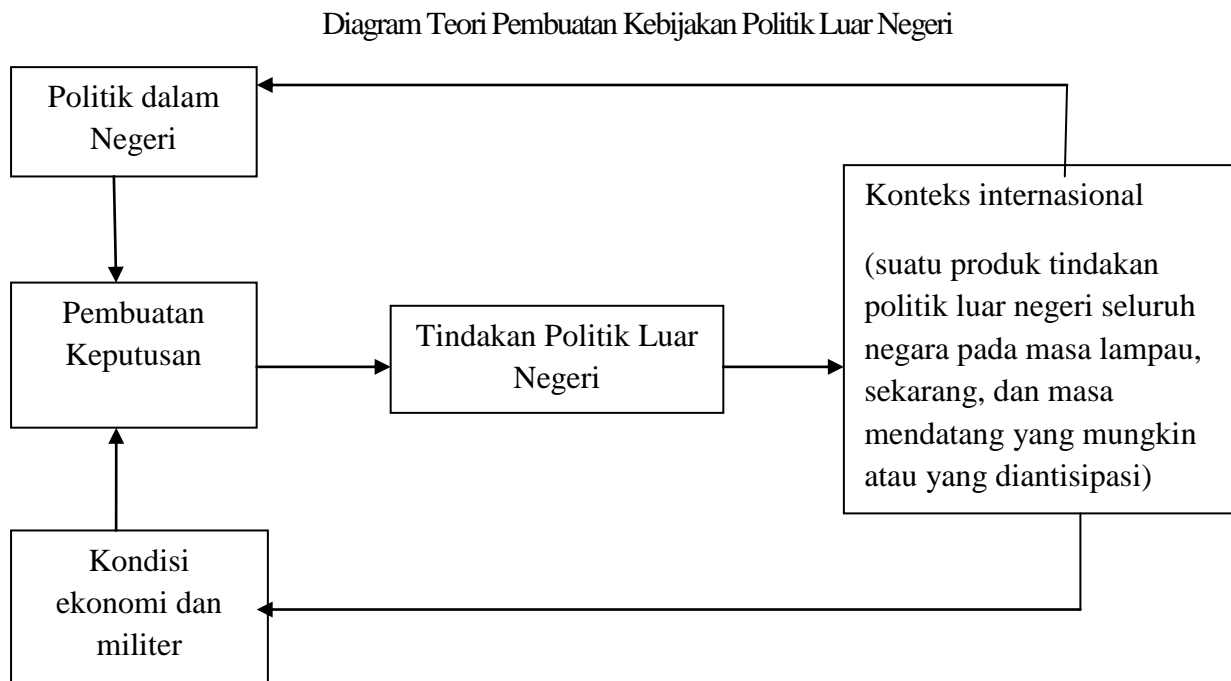
¹³ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, Hal. 219

¹⁴ Sofyan Efendi, *Unsur-unsur Pengertian Ilmiah*, Jakarta, LP3ES, Hal.14

keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah: (1) Kondisi politik dalam negeri (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain dalam sistem internasional itu¹⁵

Menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan politik luar negeri:

Gambar 1.1



Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, Sinar Baru Algensido, Bandung. 2003

¹⁵ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). Hal.30

Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Akan tetapi pengambilan keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini Presiden atau Perdana Menteri sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional yang memang cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam pengambilan keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan Negara atau kepentingan pribadi dari pengambilan keputusan ini.

Menurut teori William D. Coplin ini menyebutkan bahwa dalam kaitannya terhadap politik luar negeri, politik dalam negeri berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Sedangkan konteks Internasional adalah posisi khusus Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain dalam sistem internasional itu, dimana merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh Negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin atau yang diantisipasi.

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan bahwa keputusan Turki untuk terlibat dalam konflik Xinjiang dipengaruhi oleh dua hal yakni politik dalam negeri serta keadaan ekonomi dan militer. Kemudian keputusan Turki tersebut tampak dalam tindakan politik luar negerinya yang masuk dalam konteks internasional.

1. Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri suatu Negara merupakan salah satu variabel penentu dalam pembuatan kebijakan luar negeri, karena terdapat actor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Menurut Coplin salah satu actor tersebut adalah partai yang mempengaruhi atau yang disebut *partisan influencers*. *Influencers* ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. *Influencers* ini berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bias berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kelompok ini sangat terengaruh dalam pengambilan keputusan luar negeri karena menyalurkan informasi berupa tuntutan-tuntutan masyarakat kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu.

Partisan Influencers dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran diantara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat. Selain lebih banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, *influencers* ini juga berusaha mempengaruhi politik luar negeri, terutama

*apabila kebijakan-kebijakan itu membawa ramfikasi (percabangan) dalam negeri yang kritis.*¹⁶

Dalam konteks keterlibatan Turki dalam kasus Xinjiang ini, kebijakan luar negeri Turki dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Hal ini terlihat dari masyarakat Turki yang melakukan demonstrasi besar-besaran di Istanbul yang mengancam tragedi yang menimpa rtnis Uighur di Xinjiang Tiongkok. Demo yang terjadi disebagian wilayah Turki ini menyebabkan partai AKP yang berkuasa di bawah Erdogan untuk menari solusi terbaik terhadap konflik Uighur yang terjadi.

2. Ekonomi dan Militer

Dalam perumusan politik luar negeri, para pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan-kelemahan Negaranya. Dia harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya yang diakibatkan karena kondisi ekonomi dan militer.¹⁷

a. Kondisi ekonomi

Terdapat dua dimensi ekonomi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri yaitu kapasitas produksi ekonomi dan kebergantungann ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional.¹⁸ Penaksiran kapasitas ekonomi suatu Negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran negara tersebut, sejauh mana

¹⁶ William. D. Coplin, Pengantar Politik Internasional, Sinar Baru Algensindo, Bandung. 2003 hal 84

¹⁷ *Ibid*, hal. 110

¹⁸ *Ibid*, hal. 341

kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan pola-pola pertumbuhan ekonominya. Sehingga kita tertarik pada masalah jumlah absolut barang dan jasa yang diproduksi, jumlah relatif (yaitu relatif terhadap permintaan terhadap ekonomi), dan prospek pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Jika kita membahas kapasitas ekonomi suatu Negara, kita tidak hanya memperhatikan seluruh kapasitas produksinya saja, tetapi juga kapasitasnya apabila dibandingkan dengan Negara-negara lain, serta kemampuan Negara tersebut untuk memenuhi tuntutan ekonomi rakyatnya secara kuantitatif (kekayaan perkapita) dan secara kualitatif (jenis produknya).²⁰

b. Kondisi Militer

Kekuatan militer tidak hanya berkaitan dengan jumlah tentara, kualitas perlengkapan, dan tingkat keterampilan. Akan tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri.²¹ Makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan angkatan bersenjatanya, makin rawan pula negara itu terhadap kendala-kendala dari luar, dalam menggunakan kekuatan.²² Tugas utama militer adalah untuk melindungi negara terhadap serangan negara lain, dan bila dianggap perlu bagi pengambil keputusan politik luar negeri dalam peperangan, peran pasukan militer yang paling penting dalam kapasitasnya untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial

¹⁹ *Ibid*, hal. 115

²⁰ *Ibid*, hal. 120

²¹ *Ibid*, hal. 142

²² *Ibid*, hal. 126

dan politik di dalam negeri yang akan meruntuhkan rezim pemerintah yang ada, atau yang akan menimbulkan kehancuran.²³

3. Konteks Internasional

Secara tradisional, para analis telah menekankan bahwa sistem internasional dan hubungan antara Negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana Negara akan berperilaku. Hal ini dibahas dalam teori yang berkaitan dengan geopolitik dan realisme. Kautilya berasumsi bahwa Negara-negara akan berusaha memperluas wilayahnya. Sehingga menurut Kautilya, Negara-negara yang bertetangga akan selalu menjadi musuh, dan tetangga tetangganya akan merupakan sahabat.²⁴

Tokoh pemikir realis, Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini dianggap penting dalam menentukan politik luar negeri suatu Negara. Aspek geografi juga masih penting karena banyak kaitannya dengan penetapan kepentingan nasional. Tetapi faktor lain dari kekuatan ekonomi dan militer sekarang masuk dalam rumusan itu.²⁵ Menurut pendekatan ini, negara-negara kecil hanya bisa menjalankan kebijakan bersekutu dengan negara-negara yang cenderung melindunginya.

²³ *Ibid*, hal. 129.

²⁴ *Ibid*, hal. 165.

²⁵ *Ibid*, hal. 166.

Dalam konteks keterlibatan Turki dalam konflik Xinjiang, faktor pendorong yang sesuai untuk digunakan sebagai tindakan luar negeri Turki adalah politik dalam negeri.

Tindakan Turki dalam keterlibatannya di konflik Xinjiang, didasarkan kepada politik dalam negeri. Politik dalam negeri yang dilakukan Turki adalah intervensi dalam konflik Xinjiang. Intervensi adalah adanya campur tangan urusan Negara dengan Negara lain atau sekelompok Negara untuk mempengaruhi kebijakan internal atau eksternal Negara itu.²⁶ Menurut hukum internasional, intervensi dapat dibenarkan secara hukum:

1. Jika Negara intervering telah diberikan hak oleh perjanjian
2. Jika suatu Negara melanggar perjanjian untuk penentuan kebijakan bersama dengan bertindak secara sepihak
3. Jika intervensi diperlukan untuk melindungi warga Negara suatu Negara
4. Jika diperlukan untuk pertahanan diri
5. Jika Negara melanggar hukum internasional. Intervensi juga dibenarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa ketika melibatkan tindakan kolektif oleh masyarakat internasional terhadap Negara yang mengancam perdamaian atau melakukan suatu tindakan agresi.

²⁶ Jack C.Plano and Roy Olton, *International Relations Dictionary*, Rinehart and Wisnston. New York: 1969, hal. 62.

Didalam konsep intervensi terdapat dua motivasi yaitu motivasi afektif dan motivasi instrumental yaitu:

1. Motivasi afektif adalah motivasi yang digunakan untuk menjelaskan mengapa Negara melakukan atau terlibat dalam konflik antar etnis.²⁷

Motivasi afektif ini meliputi adanya persamaan kesamaan identitas atau kinship. Adanya ikatan dan kinship tersebut menciptakan sebuah perasaan familial dan emosional yang ada di dalam sekelompok orang terhadap kelompok lain serta menciptakan suatu ikatan diantara mereka.

2. Motivasi instrumental adalah ikatan etnis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan Negara terutama melalui public domestik, yaitu melalui tekanan publik dan konstituen.²⁸

Dari konsep diatas intervensi yang dilakukan Turki adalah membela muslim Uighur yang ada di Xinjiang dengan membawa isu ini ke dewan keamanan PBB dengan tujuan untuk melindungi warga Uighur atau Turkestan Timur yang berada di wilayah Xinjiang Tiongkok yang masih merupakan satu etnis dengan Turki. Ikatan etnis dikatakan sebagai salah satu motif utama dari intervensi suatu negara terhadap konflik etnis di negara lain. Selain itu ikatan etnis ini juga berpengaruh dalam politik luar negeri suatu negara.²⁹

²⁷ Stephen M. Saideman, *The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, And International Conflict*, New York: Columbia University Press, 2001, hal.22.

²⁸ *Ibid*

²⁹ David Carment, 'The Internationalization of Ethnic Conflict: State, Society and Synthesis', *International Studies Review* 2009.

Menurut konsep intervensi diatas, Turki melakukan tindakan intervensi dikarenakan adanya:

1. Motivasi afektif. Dalam kasus keterlibatan Turki dalam konflik Xinjiang, Turki mempunyai beberapa keturunan klan di Asia Tengah yang memiliki asal, bahasa, tradisi dan kebudayaan serta agama yang sama.

Secara geografis, penyebaran etnik, bahasa, dan budaya Turki menyebar mulai dari Xinjiang Tiongkok, dan di beberapa Negara di Asia Tengah yang meliputi Tajikistan, Kyrgistan, Uzbekistan, Kazhakstan. Hal ini membuat Turki memiliki ikatan semacam tali persaudaraan dengan beberapa wilayah-wilayah tersebut. Salah satunya adalah etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang di Tiongkok. Etnis Uighur berasal dari salah satu etnis Proto-Turki yang merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Tiongkok dengan jumlah sebesar 9,65 juta jiwa dan menduduki wilayah otonomi yang terbesar di Tiongkok, yaitu Xinjiang Uighur Autonomous Region.³⁰ Etnis Uighur ini mempunyai kesamaan budaya, sejarah dan agama dengan etnis-etnis Turki lainnya yang mendiami kawasan Asia Tengah hingga Republik Turki. Kedekatan mereka berasal dari adanya keturunan yang sama dan hal tersebut menciptakan suatu rasa primordialisme yang kuat diantara bangsa Turki meskipun kini telah terpecah menjadi beberapa Negara berdaulat.³¹

³⁰ http://www.sino-platonic.org/complete/spp150_uyghurs.pdf diakses pada tanggal 21 Oktober 2014.

³¹ <http://www.economist.com/node/14052216> diakses pada tanggal 21 Oktober 2014

2. Motivasi yang kedua adalah motivasi instrumental. Dalam kasus keterlibatan Turki dalam konflik Xinjiang, dorongan tersebut datang dari warga Turki yang melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung etnis Uighur di Ankara dan Istanbul. Lalu dorongan yang kedua adalah dari media massa yang memberitakan secara lengkap konflik yang terjadi di Xinjiang tersebut dan juga memberitakan tentang hubungan etnisitas Uighur dengan Turki. Dorongan berikutnya datang dari menteri Perdagangan dan Industri Turki Nihat Ergun yang menyerukan boikot terhadap produk dari Tiongkok. dan terakhir dorongan dari Perdana Menteri Erdogan yang mengecam pemerintah Tiongkok agar segera menyelesaikan konflik di Xinjiang.

D. Hipotesa yang Digunakan:

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Turki terlibat dalam konflik Xinjiang karena didasarkan oleh:

1. Kesamaan etnis.
2. Dorongan dari publik Turki.

E. Jangkauan Penelitian:

Pada penelitian ini diberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah penulis dalam menganalisa persoalan yang akan dilakukan sehingga

penulisan menjadi jelas, dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun batasan waktunya adalah pada tahun 2009.

F. Teknik Pengumpulan Data:

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menggunakan pada studi kepustakaan (library research). Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literature, buku, surat kabar, jurnal, situs internet dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa digunakan untuk mengupas masalah ini. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara Deskriptif.

G. Sistematika Penulisan:

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci kedalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan berisikan langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut: Judul, tujuan penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jngkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika penulisan.
- Bab II: Sejarah Konflik Xinjiang yang meliputi akar sejarah konflik Xinjiang, sejarah etnis Uighur di Xinjiang.
- Bab III: Latar belakang Negara Turki, dinamika hubungan Turki-Tiongkok dan latar belakang keterlibatan Turki dalam konflik Xinjiang yang disebabkan karena factor etnis dan dorongan dari public Turki.
- Bab IV: Bab ini mengikat keseluruhan perjalanan pembahasan, dari Bab 1 hingga bab IV dalam sebuah kesimpulan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan.

